

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Generasi milenial saat ini banyak perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan, seperti pemimpin di ranah politik, ekonomi, pemerintahan dan lain-lain. Namun untuk mendapatkan posisi ini, wanita harus berusaha dua kali lebih banyak daripada pemimpin laki-laki. Perempuan perlu memperlihatkan diri kepada masyarakat bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin mereka juga bisa melakukan sesuatu yang dianggap sebagai “pekerjaan laki-laki”. Hal seperti ini masih belum bisa disebut kesetaraan gender. Masih ada laki-laki atau orang-orang di luar sana yang masih beranggapan bahwa perempuan adalah manusia kedua setelah laki-laki, dan pendapatnya sering dianggap remeh atau sering tidak didengarkan.<sup>1</sup>

Untuk mengetahui bagaimana disparitas gender sehingga menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dicermati berdasarkan ketidakadilan yang ada, yakni: marginalisasi atau kemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, stereotip, kekerasan, beban kerja lebih Panjang dan lebih banyak.<sup>2</sup>

Proses marginalisasi yang berujung pada kemiskinan, sejujurnya banyak terjadi di masyarakat dan negara yang mempengaruhi laki-laki dan perempuan yang berakibat berbagai peristiwa, seperti penggusuran, bencana alam atau prosesedur eksploitasi. mungkin ada satu bentuk diskriminasi terhadap wanita, yang disebabkan oleh gender. Ada beberapa jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme cara marginalisasi perempuan karena perbedaan gender tersebut. Asal-usulnya bisa dari peraturan pemerintah, kepercayaan, interpretasi non sekuler, kepercayaan tradisional dan perilaku atau bahkan ilmu pengetahuan. Marginalisas terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja seperti di tempat kerja, terjadi di dalam rumah tangga, masyarakat atau subkultur dan bahkan di negara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Reni Yulianti, Dedi DP dkk, “*Woman Leadership: telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin*”, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, VOL 10, No 2 (2018)21-22.

<sup>2</sup> Mansour Fakih, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013): 12.

<sup>3</sup> Mansour Fakih, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”: 14.

Subordinasi adalah pandangan perseorangan atau suatu kelompok masyarakat menganggap bahwa salah satu jenis kelamin tertentu itu lebih penting daripada yang lain. apakah itu laki-laki yang dianggap penting daripada perempuan atau perempuan yang lebih penting daripada laki-laki. Nilai-nilai sosial dan budaya seperti itu di dalam masyarakat telah memisahkan pekerjaan laki-laki dan perempuan. Di mana perempuan dianggap lebih bertanggung jawab dan memiliki kedudukan dalam urusan rumah tangga atau reproduksi, sebagaimana laki-laki dalam urusan publik atau produksi.<sup>4</sup> Hal tersebut adalah dampak dari bentuk dan struktur sosial yang menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi yang dirugikan. Subordinasi sebab gender tersebut terjadi dalam berbagai bentuk yang berbeda, dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional oleh karena itu perempuan tidak dapat tampil sebagai pemimpin, dan akan berdampak memiliki sikap yang nantinya menilai perempuan pada posisi yang tidak penting.<sup>5</sup>

Stereotip adalah pemikiran terhadap suatu kelompok tertentu yang kurang baik. Stereotip selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip tersebut adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang sudah memiliki penanda bagi perempuan itu sendiri. Seperti masyarakat memiliki gagasan bahwa seorang perempuan berkewajiban untuk melayani suaminya terlebih dahulu. Atau dalam ranah politik seperti penganggapan bahwa perempuan itu tidak layak sebagai seorang pemimpin. Selain itu, stereotip terhadap perempuan ini tersebar luas. Karena stereotip ini, banyak peraturan pemerintah, norma agama, praktik budaya, dan norma masyarakat didirikan.<sup>6</sup> Perempuan merasa terbebani ketika mereka digambarkan sebagai stereotip perempuan yang feminin, maskulin, dan androgini. Akibatnya, perempuan merupakan sosok yang kuat serta keberadaannya harus dihargai dan diakui.<sup>7</sup>

Serangan terhadap integritas fisik atau mental seseorang merupakan kekerasan. Asumsi gender seseorang adalah salah satu

---

<sup>4</sup> Lilis Karwati, "Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografis 2035". *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*. Vol.5, No.2 (2020:10): 125

<sup>5</sup> Mansour Fakhri, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial":15.

<sup>6</sup> Mansour Fakhri, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial": 16-17.

<sup>7</sup> Fofi Fana Dkk, "Stereotip Gender Perempuan Pada Masyarakat Desa Klepu Kecamatan Sudimoro Pacitan" Universitas Negeri Semarang, Surabaya (2018:10):1374

penyebab utama kekerasan terhadap manusia. Kekerasan gender terutama disebabkan oleh ketidak setaraan kekuasaan yang tidak seimbang dalam masyarakat. Kekerasan gender dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: pemerkosaan, pemukulan, kekerasan terhadap alat kelamin, pelacuran, pornografi, sterilisasi paksa dalam keluarga berencana, memegang alat kelamin, dan kekerasan terselubung adalah contoh dari jenis tindakan tersebut.<sup>8</sup>

Kekerasan juga bisa terjadi ketika kurangnya pemahaman mengenai agama yang disalahgunakan atau ketika agama seolah-olah digunakan sebagai pembenaran kekerasan oleh mereka yang tidak memahami konteks agama.<sup>9</sup> Pelecehan seksual adalah kejahatan paling umum terhadap perempuan di masyarakat. Karena sering terjadi sebagai upaya seseorang untuk menjadi sahabat, maka banyak orang yang beranggapan bahwa pelecehan seksual itu sangat relatif. Pelecehan seksual di sisi lain, bukanlah upaya mencari sahabat, karena hal tersebut sama saja menyakiti perempuan.<sup>10</sup>

Diyakini bahwa ketentuan sosial gender (peran gender) merupakan faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan sosial, yang sangat merugikan posisi perempuan dalam berbagai komunitas sosial, termasuk pendidikan, sosial budaya, politik, dan ekonomi.<sup>11</sup> Banyak anggapan bahwa perempuan bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah, banyak orang percaya bahwa karena perempuan perhatian dan rajin namun tidak pantas untuk menjadi pemimpin rumah tangga yang ideal. Untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, banyak perempuan yang menghabiskan waktunya berjam-jam. Ini merupakan beban berat yang harus dipikul oleh perempuan, terutama pada keluarga miskin; jika seorang wanita harus bekerja, dia juga harus memikul beban ganda.<sup>12</sup>

Sedangkan Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan yang ada, contohnya dalam proses pelaksanaan pembangunan. Ukuran partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut; perempuan merupakan pelaku atau pelaksana dalam proses

---

<sup>8</sup> Mansour Fakhri, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”: 18.

<sup>9</sup> Muhammad Rifa’at Adiaktari Farid. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center”. *Jurnal Studi Gender*, Vol.14, No.2 (2019): 186

<sup>10</sup> Mansour Fakhri, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”: 20-21

<sup>11</sup> Prihatin Evendi, Devi Ratnasari. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. *Universitas Gresik, Gresik*, Vol.3, No.1 (2019): 4.

<sup>12</sup> Mansour Fakhri, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”: 21

pembangunan tersebut, perempuan terlibat langsung terhadap pengendalian dari pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengambil keputusan, penasehat dalam proses pembangunan, serta perempuan juga berperan sebagai penerima manfaat dalam pembangunan. Hasil pembangunan juga harus bisa dinikmati oleh perempuan, hal ini memberikan perhatian terhadap pembangunan yang telah direncanakan dan sudah dipertimbangkan perempuan sebagai penerima manfaat pembangunan itu sendiri.<sup>13</sup>

Partisipasi perempuan dalam ranah politik masih menghadapi beberapa tantangan, karena budaya patriarki yang membatasi hak perempuan untuk masuk ke politik, terutama di lembaga legislatif dan kurangnya pendidikan tentang politik. ada kecenderungan partisipasi perempuan dalam politik di negara-negara berkembang menjadi sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. akibatnya, mereka terlibat dalam hal-hal yang biasanya memang didahulukan sebelumnya yaitu urusan rumah tangga.<sup>14</sup>

Dunia perpolitikan di Indonesia lebih mengarah terhadap laki-laki atau politik maskulin, hal ini dapat terjadi karena politik terlihat sebagai kepentingan yang identik dengan kekuasaan negatif, wibawa, kekerasan, mobilisasi massa dan persaingan, dimana kondisi tersebut tidak dimiliki oleh perempuan. Dimana perempuan lebih mengutamakan perdamaian. Adanya kesetaraan gender dalam bidang politik perlu diciptakan dengan maksud untuk mewujudkan cita-cita demokrasi yang mengutamakan prinsip-prinsip keterbukaan, kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara, baik perempuan maupun laki-laki, untuk dapat berkiprah di berbagai kehidupan di wilayah dan negara.

Disparitas partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan terlihat dalam keanggotaan di DPRD Kabupaten Grobogan, hanya terdapat 6 anggota perempuan dari 50 anggota di DPRD Kabupaten Grobogan. 2 anggota di antaranya merupakan anggota dari partai islam PKB, 3 anggota dari partai PDI, dan 1 dari partai Gerindra.

---

<sup>13</sup> Atika Rati, Fatmariza, "Hambatan Perempuan dalam Berpartisipasi terhadap Pembangunan Nagari," *Journal of Civic Education* Vol.3, No.4 (2020): 399. Di akses pada tanggal 14 oktober 2022, <https://jce.unp.ac.id/index.php/jce/article/download/386/173/>

<sup>14</sup> Herdin Arie Saputra dkk, "Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019," *Jurnal Kajian Gender* Vol. 12, No.1 (2020): 93 Di akses pada tanggal 18 Oktober 2022, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt0%2C5&q=minimnya+partisipasi+perempuan&eq=part#d=gs\\_qabs&t=1666102054740&u%23p%3DTEO-HQB47UJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt0%2C5&q=minimnya+partisipasi+perempuan&eq=part#d=gs_qabs&t=1666102054740&u%23p%3DTEO-HQB47UJ)

Karena memang partai politik merupakan tempat yang tepat untuk mengajukan anggota-anggota perempuan di ranah legislasi politik.<sup>15</sup>

Peluang perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik juga terbuka lebar dan sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia. Dalam upaya meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di ranah perpolitikan, dan terkait dengan upaya peningkatan peran perempuan dalam dewan perwakilan rakyat (DPR). Akhirnya bertambah menjadi 30% bagi perempuan untuk duduk dikursi kepengurusan partai, dan lembaga DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau kota sejak ada UU No 12 2003. Dengan adanya UU No 12 tahun 2003 tersebut, ada upaya dan strategi untuk meningkatkan representasi keterwakilan perempuan di parlemen. Guna meminimalisir ketimpangan identitas dan kepentingan dari hasil pemilu dalam pengalaman politik perempuan.<sup>16</sup> Namun dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Grobogan periode 2019-2024 kursi perempuan hanya di isi 6 anggota atau 12% dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang berjumlah 50 anggota.

Tulisan terkait representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan periode 2019-2024 ini menarik untuk ditulis, terkait beberapa argumentasi: pertama, kajian mengenai representasi politik perempuan khususnya masalah keterwakilan perempuan dalam dunia perpolitikan, mengenai kesetaraan gender. Kedua, tulisan ini juga menarik ditulis karena representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan yang masih rendah, maka dari itu membahas mengenai kendala atau faktor penghambat yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan.

## B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengkaji mengenai representasi keterwakilan perempuan Muslimah di lembaga legislasi politik sebagai inti dari kajian yang dipilih oleh penulis. Penulis memfokuskan penelitian ini terhadap anggota perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan dari partai politik islam PKB dan partai PDI, untuk mengetahui representasi perempuan dalam menganalisis faktor

---

<sup>15</sup> Ana Sabhana Azmy, Isnaini Anis Farhah. Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD), *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol 14 No.1 (2018): 76.

<sup>16</sup> Dirga Ardiansa, Manghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia, *Jurnal Politik: Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia*, Vol 2, No 1, Agustus (2016):72.

pendukung dan penghambat keterwakilan perempuan, serta menjalankan fungsinya sebagai DPRD.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mendapatkan gambaran tentang sistem permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa representasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan periode 2019-2024 di bawah standar 30%?
2. Apa faktor penghambat yang menyebabkan representasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan periode 2019-2024 ?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian digunakan pada saat menyusun sebuah karya ilmiah, berdasarakan rumusan masalah yang digunakan penulis dalam memecahkan permasalahan, penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini, yakni

1. Untuk menganalisis representasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan periode 2019-2024 yang masih di bawah standar 30%.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat yang menyebabkan representasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan periode 2019-2024.

### E. Manfaat Penelitian

Kajian ini berpotensi untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam representasi perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan periode 2019-2024 baik manfaat secara teoretis maupun praktis, yaitu dengan menyediakan data yang logis dan sesuai dengan harapan penulis terhadap penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis (Teoritis)
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan konsep yang sesuai dengan representasi keterwakilan perempuan di lembaga legislasi.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, terutama untuk Prodi Pemikiran Politik Islam.
  - c. Diharapkan peneliti lain dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai studi banding dan menambah informasi

berupa bahan referensi untuk menambah pengetahuan, khususnya dalam program studi pemikiran politik Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Pengetahuan perkuliahan dan pemahaman tentang politik keterwakilan perempuan di lembaga legislatif diharapkan dapat menjadi masukan dalam penelitian ini.

b. Bagi DPRD Kabupaten Grobogan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kapasitas kemampuan analisis dalam melihat bagaimana sebenarnya keterwakilan perempuan dalam perpolitikan nasional.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, selain dapat menjadi acuan bagi politik representasi perempuan dalam Lembaga legislasi, khususnya anggapan masyarakat sebagai upaya untuk mendongkrak informasi dalam politik mengenai keterwakilan dan dapat menghasilkan suatu tujuan. pola pikir untuk jaringan yang lebih luas

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan mendapatkan gambaran penyusunan yang utuh dan menyeluruh dalam penulisan skripsi ini. Penelitian deskriptif ini dipisahkan menjadi lima bagian yang saling berhubungan dengan tujuan eksplorasi. Dalam penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dibagian penyusunan proposal skripsi ini diawali dari Sampul, Pengesahan, Pernyataan keaslian skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel.

2. Bagian Tengah

Bagian ini terdiri dari tiga bab, satu dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. ketiga bab tersebut adalah:

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memaparkan tentang Latar belakang dari masalah yang di ambil oleh peneliti yang sekiranya masih umum. Dalam bagian initerdari dari Latar Belakang, Rumusan masalah, Fokus

penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan.

**BAB II KERANGKA TEORI**

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dan kajian teori mengenai representasi politik perempuan Muslimah dalam lembaga legislasi. Selain itu, bab ini memuat kerangka pemikiran serta literatur hasil penelitian terdahulu, yang digunakan sebagai data tambahan berupa jurnal dan skripsi untuk membandingkan penelitian pada subjek yang dibahas. Lalu dalam bab ini juga berisi tentang kerangka berfikir.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian penulis yang meliputi jenis dan pendekatan, setting penelitian, sumber data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis memberikan gambaran lokasi penelitian, deskripsi temuan, dan analisis data representasi politik perempuan muslim di DPRD Grobogan periode 2019-2024. Setelah itu, maksud dari tujuan penelitian dapat diketahui dengan jelas dari hasil penelitian.

**BAB PENUTUP**

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dijelaskan, keterbatasan dalam penelitian serta saran untuk menjadikan penelitian ini berkelanjutan, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Berisi daftar pustaka, yang mencakup sumber-sumber relevan yang digunakan dalam penelitian penulis untuk memecahkan masalah, digabungkan dalam bagian ini. Segmen ini juga menyertakan lampiran untuk menyelesaikan data dalam penelitian.